

Volume 9 No: 2 April 2017

ISSN : 2087-0957

SOSIALITA

Jurnal Ilmu Administrasi



JIA

Vol. 9

No. 2

Hlm 1- 72

Bandar Lampung, April 2017

ISSN 2087-0957

DITERBITKAN OLEH :
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

Volume 9 No: 2 April 2017

ISSN : 2087-0957

SOSIALITA

Jurnal Ilmu Administrasi

JIA	Vol : 9	No : 2	Hlm 1- 72	Bandar Lampung, April 2017	ISSN : 2-087-0957
-----	---------	--------	-----------	----------------------------	-------------------

DITERBITKAN OLEH :
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

SOSIALITA

JURNAL ILMU ADMINISTRASI

Jurnal **SOSIALITA** diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Bandar Lampung.

Susunan Personalia

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Bandar Lampung

Dewan penyunting

Ketua Penyunting : Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Wakil Ketua Penyunting : Drs. Suwandi, M.M

Anggota : Drs. Soewito, M.M

Penyunting Ahli : Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si (Universitas Bandar Lampung)
Dr. Supriyanto, M.Si (Universitas Bandar Lampung)
Dr. Suropto, S.Sos., M.AB (Universitas Lampung)

Administrasi dan Distribusi : Maslechah

Alamat Redaksi:

Gedung Rektorat Lantai 6. FISIP Universitas Bandar Lampung
Jalan ZA. Pagar Alam No: 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung
Telp : 0721 771331

DAFTAR ISI

No	Judul	Hal
1	Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) Sebelum dan Setelah Merger Pada perusahaan Go Public Yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2012	1
2	Revitalisasi Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Oleh; DRS. ACHMAD ZACHRUDDIN, M.M	10
3	Upaya Transformasi Birokrasi Pemerintah Sebagai Unit Pelayan Publik Oleh : DRS. RUSDAN, M.SI	18
4	Refleksi Etika Bisnis Dalam Perspektif Moral Dan Spiritual (Syariah) Oleh. MUHAMMAD MACHRUS, SE.,M.SI	29
5	Analisis Pengaruh Arus Kas dan Pertumbuhan Laba Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2014 Oleh. MEDYA DESTALITA, ZAKIE MUHAMMAD	39
6	Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Intensi Berwirausaha (Studi Pada Mahasiswa S1 Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Bandar Lampung) Oleh; SUPRIYANTO, ELFIRA	50
7	Penguatan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Daya Saing UKM Produk Unggulan Di Kota Bandar Lampung oleh : AGUS PURNOMO	64

JIA	Vol : 9	No : 2	Hlm 1- 72	Bandar Lampung, April 2017	ISSN : 2-087-0957
-----	---------	--------	-----------	----------------------------	-------------------

BIODATA PENULIS

1. DRS. SOEWITO, M.M, DOSEN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG.
2. DRS. ACHMAD ZACHRUDDIN, M.M, DOSEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS BATU RAJA
3. DRS. RUSDAN M.SI, DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATU NUSA BANDAR LAMPUNG
4. MOHAMMAD MACHRUS, SE., M.SI, DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATU NUSA BANDAR LAMPUNG
5. MEDYA DESTALISA, DOSEN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG
6. SUPRIYANTO, DOSEN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG.
7. AGUS PURNOMO, DOSEN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG.
8. APRISA KUSUMAWATI, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG
9. ZAKIE MUHAMMAD, JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG

JIA	Vol : 9	No : 2	Hlm 1- 72	Bandar Lampung, April 2017	ISSN : 2-087-0957
------------	----------------	---------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------

UPAYA TRANSFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH SEBAGAI UNIT PELAYAN PUBLIK

RUSDAN

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satu Nusa Bandar Lampung

ABSTRACT

Birokrasi sebagai organ pemerintah yang hampir selalu bersinggungan dengan masyarakat, karena keberadaan birokrasi sebagai pelayan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat sangat dinamis, sejalan dengan perkembangan berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu birokrasi pemerintah harus mampu mengikuti perubahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan kecepatan dan akurasi dalam proses pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan birokrasi adalah mentransformasi fungsi dan tugas pelayanan melalui mentransformasi birokrasi baik aspek individual, yakni melalui perubahan sikap dan cara pandang aparatur birokrasi tentang fungsi dan tugas secara profesional dan dalam memprsepsikan jabatan., maupun secara innstitusional yakni dengan memperkuat sistem carrot and stick serta desentralisasi wewenang.

Keywords : Transformasi, Pelayanan publik.

Pendahuluan

Salah satu agenda utama pemerintah pada saat ini untuk mengefektifkan fungsinya, melalui upaya peningkatan fungsi birokrasi. Hal ini tidak terlepas dari realitas dan disadari oleh pemerintah dan berbagai pihak, bahwa disatu sisi birokrasi dianggap sebagai organ pemerintah yang lamban, korup bahkan cenderung menghambat, namun disisi lain secara faktual birokrasi dibutuhkan agar ada keteraturan proses dan dapat memberikan legitimasi bagi berbagai pihak untuk mendapatkan kan sesuatu yang dianggap berharga dan

penting. Seperti dikemukakan oleh **Damanhuri** (Tanthowi dkk. : 180 : 2005) yang harus diperhatikan saat ini adalah status public servant, pelayan masyarakat dari birokrasi pemerintahan, yang bertugas untuk memberikan layanan terbaik untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri atau kelompoknya. Pernyataan tersebut pada dasarnya merupakan gambaran riel yang masih nampak dalam aktivitas fungsi dan tugas birokrasi pemerintah. Realita yang dihadapi oleh birokrasi sebagai unit pelayan publik dibentuk dengan tujuan utama untuk menjaga suatu sistem agar masyarakat dapat menjalankan

kehidupan secara wajar melalui pemenuhan kebutuhan dan kepentingan, yang sebagian menjadi tanggung jawab birokrasi. Birokrasi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat hidup layak dan mencapai keadaan yang lebih baik. Menurut **Osborn dan Gaebler** (192 : 1999) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah mencari cara untuk dapat menyenangkan warganya. Pendapat tersebut bermakna pemerintah dibentuk untuk menyelenggarakan kepentingan umum agar kebutuhan bersama dapat dikelola secara tertib dan teratur, sehingga secara tegas **Rasyid** (115 : 1997) menyatakan bahwa fungsi utama pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat..

Dewasa ini fungsi birokrasi menjadi perdebatan publik, terutama sejak adanya upaya pemerintah mereformasi birokrasi dengan berbagai cara agar sebagai pelayanan masyarakat mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahkan saat ini pelayanan kepada masyarakat sudah dijadikan alat ukur penting kinerja birokrasi. Semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, semakin besar tanggung jawab birokrasi untuk memenuhinya, yang bermakna pelayanan pemerintah kepada masyarakat merupakan misi penting bagi pemerintah agar masyarakat merasa terpuaskan. Menurut **Supriatna** (99 : 1997) dalam pelaksanaan proses

pemerintahan dan pembangunan di negara berkembang, pemerintah mempunyai kedudukan yang strategis ini berkaitan dengan fungsinya selaku pelayan publik guna meningkatkan kesejahteraan , keadilan, keamanan, dan ketentraman masyarakat.

Jika dilihat dari pendapat diatas berarti tugas birokrasi sangat urgen dan penting. Menyadari tugas dan tanggung jawab yang berat dan sulit tersebut, maka upaya dari pemerintah untuk membenahi birokrasi dengan mengupayakan pembenahan kualitas birokrasi, agar dalam menjalankan fungsi dan tugasnya efektif dan efisien sesuai dengan ukuran yang menjadi standar kerja yang normatif. Memang untuk merubah kondisi birokrasi memerlukan upaya yang bersifat simultan Menurut **Heckscher dan Donnellon** (Thoha : 171 : 1995) semuanya mengalami semacam shock of disillusionment yang ditimbulkan dari perubahan untuk merevitalisasi birokrasi. Akan tetapi, gejala semacam ini selalu ada dimana saja , dan ternyata hanya berllangsur sebentar, karena mereka bersama-sama menginginkan adanya upaya upaya dan tercapainya hasil-hasil revitalisasi tersebut.

Untuk mengefektifkan peran birokrasi tersebut, dibutuhkan transformasi baik dalam tataran individual maupun kelembagaan, dengan harapan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan dapat terpenuhi. Pertimbangan kecepatan dan kelancaran dalam memberikan

pelayanan sebagai konsekuensi semakin tingginya tuntutan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan layanan masyarakat, harus ada perubahan paradigma dari birokrasi, dengan merubah cara pandang, sikap dan tindakan dari birokrasi baik secara kelembagaan maupun secara personal. Hal ini sangat penting dilakukan secara revolusioner dalam artian adanya perubahan secara mendasar dan fundamental, karena perubahan dan perkembangan masyarakat sangat cepat. Seperti dikemukakan oleh **Osborne dan Gaebler** (17 : 1999) bahwa sebagian besar lembaga pemerintah melaksanakan tugas yang semakin kompleks, dalam lingkungan yang kompetitif dan berubah dengan cepat, dengan pelanggan yang menginginkan kualitas dan pilihan. Birokrasi merupakan unit kerja pemerintah terdepan, sehingga tidak boleh melupakan misi pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, artinya pemenuhan kepentingan masyarakat secara cepat dan baik sebagai konsekuensi pada tingginya tuntutan masyarakat.

Masalah

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi, pada sisi lain birokrasi sering diposisikan secara negatif dengan kelambanan, kurang efisien , bahkan manipulatif, maka yang penting untuk menjadi pokok perhatian adalah bagaimana cara untuk melakukan transformasi

birokrasi agar fungsi dan tugas pokok sebagai public servant diwujudkan.

Konsepsi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik

Dalam pemerintahan modern, posisi birokrasi sebagai pelayan publik menjadi ukuran penting terhadap keberhasilan pemerintah dimata publik. Sudah menjadi pendapat umum bahwa unit kerja pemerintah yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat, sering diidentikkan dengan kelambanan, kesulitan atau istilah negatif lainnya karena sangat sulitnya untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Padahal fungsi yang dijalankan oleh pemerintah berbeda dengan swasta, karena fungsi pelayanan pemerintah dalam memenuhi kepentingan masyarakat yang tidak dapat dilakukan oleh organisasi lain, terutama organisasi yang berorientasi pasar yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakadilan. Menurut Supriatna dalam proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat birokrasi pusat dan lokal harus memiliki tiga aspek penting. Tiga aspek penting itu ialah (Supriatna : 104 : 1997) :

Pertama, memiliki tanggung jawab yang tinggi selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Kedua, responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang membutuhkan pelayanan masyarakat dalam arti luas. Ketiga, komitmen dan konsisten terhadap nilai standar

moralitas dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Pendapat tersebut secara tegas memposisikan pentingnya birokrasi dalam hubungan dengan masyarakat dan untuk mewujudkan posisi secara proporsional maka dibutuhkan kesadaran dari birokrasi pemerintah. Dengan posisi strategis dan menentukan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka birokrasi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelayan publik memiliki karakteristik, menurut **Stahl** (Priyono (1995 : 6-7)) sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diselenggarakan lebih urgen daripada yang diselenggarakan instansi swasta.
2. Pelayanan oleh pemerintah pada umumnya mempunyai sifat monopoli atau semi monopoli atau semi monopoli
3. Kegiatan-kegiatan instansi pemerintah terikat oleh ketentuan hukum formal.
4. Pelayanan oleh pemerintah tidak terikat pada harga pasar.
5. Perbuatan-perbuatan pemerintah dilakukan di bawah pengamatan masyarakat.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa birokrasi memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi kepada setiap anggota masyarakat. Pelayanan publik merupakan aktivitas yang bertujuan

memenuhi kebutuhan masyarakat . Apabila ditinjau dari sisi pemerintahan maka pelayanan tidak lain adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkenaan dengan hak-hak yang dimilikinya.

Pada hakekatnya pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. **Ndraha (2000: 78)** Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, dan layanan civil, termasuk layanan birokrasi . Jasa publik dan layanan civil tersebut merupakan monopoli pemerintah karena menyangkut kepentingan orang banyak. Monopoli tersebut tidak terlepas dari urgensinya dilihat dari sudut kepentingan masyarakat, sehingga dapat dikategorikan fungsi primer pemerintah, seperti dikemukakan oleh **Ndraha (2000 : 78)** :

” fungsi primer yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya, fungsi primer tidak pernah berkurang dengan bertambahnya keberdayaan masyarakat. Semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik dan layanan civil termasuk layanan

birokrasi. Kedua jenis fungsi ini disingkat sebagai fungsi pelayanan”.

Disadari bahwa ada kepentingan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak lainnya, maka birokrasi sebagai organ pemerintah memproduksi, menyalurkan sarana pemenuhan kebutuhan rakyat berbentuk jasa publik dan layanan civil. Sebagai wujud pemenuhan kebutuhan tersebut pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhannya. Pada hakekatnya pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak swasta lainnya, yang juga memproduksi jasa dan layanan kepada masyarakat. Namun tidak semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat dipenuhi oleh pihak swasta, karena mekanisme yang berlaku di pasar mungkin tidak dapat melakukannya secara maksimal atau memang pemerintah mengkondisikan demikian. Peranan pemerintah memberikan pelayanan dengan tujuan utama menjaga suatu sistem agar masyarakat dapat merealisasikan yang menjadi kebutuhan mereka.

Pada prinsipnya pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan memiliki kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Upaya transformasi birokrasi

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat, harus mampu direspon oleh birokrasi dengan mentransformasi dari dalam. Istilah transformasi berasal dari kata transform : to change in composition, structure or character dan transformation : an act, process or instance of transforming or being transformed. (Time : 565 : 1978). Dari istilah transformasi menunjukkan adanya aktivitas untuk mengubah sesuatu, baik komposisi, struktur maupun karakternya. Bertitik tolak dari pemahaman tentang transformasi, maka transformasi birokrasi berkaitan dengan kondisi internal birokrasi, yakni dalam penjalann fungsi dan tugas sebagai pelayan publik.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas birokrasi, sebenarnya merefleksikan dua sisi yang saling berhimpitan dan saling mempengaruhi, yakni birokrasi dapat dilihat dari sisi “aparatus” yakni individu-individu yang menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai institusi yang menunjukkan lembaga yang menjalankan fungsi dengan prosedur tertentu. Secara faktual, sampai saat ini masih ada stigma dari masyarakat terhadap birokrasi. Seperti dikemukakan **Albrow** (Rachbini 124 : 2002) dalam perspektif yang negatif misalnya birokrasi tersebut sebagai “ the authority or power which various government departments and their branches arrogate to themselves over their fellow citizens. Birokrasi

adalah kekuasaan dimana departemen pemerintah dan cabang-cabangnya angkuh terhadap masyarakat luas. Stigma yang melekat dalam pelaksanaan tugas birokrasi, harus disikapi oleh pemerintah dengan upaya-upaya inovatif agar peran positif dari birokrasi semakin menguat. Pentingnya perubahan paradigma tersebut tidak terlepas dari adanya kondisi eksternal yang berubah dengan cepat. Ada empat alasan utama yang dikemukakan Siagian (104 : 1994), yakni :

“Pertama, tanpa adanya persaingan pun dalam menghasilkan produk atau pemberian jasa tertentu, birokrasi pemerintahan dituntut bekerja cepat, paling sedikit untuk memenuhi tuntutan yang semakin meningkat dari masyarakat. Kedua, karena keterbatasan kemampuan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana kerja bagi seluruh aparatnya, birokrasi pemerintahan dituntut berkarya dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang setinggi mungkin yang tidak akan terwujud apabila aparat bekerja dengan lamban. Ketiga, dalam segi-segi tertentu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti dalam hal menjamin keselamatan negara, keutuhan wilayah.....aparatur pemerintah sesuai dengan tugas pokok masing-masing tidak hanya dituntut bekerja cepat, akan tetapi terus berada pada kondisi siaga. Keempat, dalam era globalisasi seperti sekarang ini, suatu pemerintahan negara dalam bidang bidang tertentu memang bersaing dengan pemerintah dan negara lain.”

Secara tegas pernyataan di atas. Bahwa sangat penting dan mendesak untuk mengubah posisi dan peran birokrasi yang sering diidentikkan dengan hal-hal negatif menjadi organ yang bekerja sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang secara massif terus berkembang. Hal ini sejalan dengan **Lawrence dan Lorch** (Thoha : 172 : 1995) bahwa bentuk organik yang berupa birokrasi itu seyogianya dapat berubah dan sangat cocok untuk situasi lingkungan yang sangat kompleks dan tidak menentu. Bahkan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, memang mengharuskan birokrasi memiliki kecepatan mentransformasi diri agar bekerja sesuai dengan standar kerja yang dibutuhkan publik. Hal itu tidak terlepas dari kenyataan perkembangan dan peningkatan kebutuhan masyarakat sangat cepat, di sisi lain, birokrasi pemerintah cenderung berubah lebih lambat, Padahal seperti diakui oleh **B. Guy Peters** (Rasyid, 44 : 1997) bahwa bureaucratic empire building tidak semata-mata berhubungan dengan keinginan dari birokrasi itu sendiri untuk tetap survive, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan fungsi-fungsi yang dipandang essensial bagi kepentingan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, secara jelas menunjukkan adanya himpitan kepentingan birokrasi untuk mentransformasi diri dengan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Faktor Individual

Dari sisi individu, maka upaya yang dibutuhkan adalah merubah sikap dan cara pandang diri dalam konteks pelaksanaan fungsi. Perubahan yang banyak berkaitan dengan sikap mental dari aparat birokrasi. Perubahan yang paling penting dari birokrasi adalah cara pandang dalam melihat fungsi dan tugasnya, harus mengarah pada profesionalisme, yakni melihat tugas sebagai tanggung jawab dan kewajiban sebagai konsekuensi dari posisi sebagai pelayan masyarakat. Berkarya secara profesional mengandung makna bahwa seseorang benar-benar memahami seluk beluk tugasnya secara mendalam. Dengan demikian, yang bersangkutan mampu menyelenggarakan tugas dengan sebaik-baiknya (Siagian : 123 : 1994). Berarti, memahami tanggung jawab dan kewajiban sangat penting. Aparat birokrasi harus menyadari, bahwa secara sadar mereka bekerja untuk melayani publik. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada publik, birokrasi pemerintahan berhubungan erat dengan perilaku manusia sebagai unsur birokrasi dalam struktur organisasi pemerintahan, baik perilaku individu dalam kelompok formal dan informal, maupun perilaku internal dan eksternal organisasi pemerintahan (Supriatna : 100-101 : 1997). Sehingga, setiap tugas yang diemban bukan hanya dipertanggung jawabkan secara formal kepada atasan atau lembaga

pemerintah, tetapi harus menyadari bahwa perjalanan tugas tersebut memiliki implikasi terhadap kepentingan publik.

Disamping itu, harus ada perubahan cara pandang dan sikap dalam memaknai jabatan. Bahwa jabatan yang dimiliki oleh seorang aparat birokrasi harus dilihat dalam konteks kewenangan artinya melekat kewenangan. Seperti dikemukakan **Surbakti** (90 : 1992) apabila orang yang berwenang atau pejabat mengklaim hak memerintah dengan menunjukkan dasar kewenangan yang bersifat prosedural maupun substansial, maka anggota masyarakat yang diperintah memiliki sikap-sikap tertentu terhadap kewenangan. Sering terjadi, aparat birokrasi tidak mampu bahkan tidak mau memisahkan situasi antara urusan yang berkaitan dengan jabatan dengan urusan diluar jabatan. Kondisi tersebut memicu terjadinya pelampauan wewenang (abuse of power). Dengan melakukan transformasi dari aparat birokrasi, maka akan mempengaruhi cara pandang mereka secara posisional dengan masyarakat. Melayani masyarakat tidak lagi bermakna negatif, sebaliknya menjadi sesuatu yang bersifat positif karena melayani sebagai bentuk tanggung jawab sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat yang bermartabat.

Faktor Institusional

Secara kelembagaan ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dari internal pemerintah

untuk meningkatkan kualitas kerja dari birokrasi, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan memiliki efek positif terhadap pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Aspek penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan menjalankan sistem kerja yang memungkinkan setiap aparat birokrasi dapat menyadari tanggung jawabnya melalui kemampuan melaksanakan tugas. Adapun mekanisme yang harus digunakan melalui pendekatan carrot and stick, menurut **Kwik Kian Gie** (Tanthowi dkk : 167 : 2005) menyatakan :

“ Carrot (wortel) berkenaan dengan penghasilan bersih pegawai sipil dan mereka yang ada di militer dan kepolisian, yang jelas cukup untuk memenuhi standar hidupnya yang sepadan dengan pendidikan, keahlian, kepemimpinan, tingkatan dan posisinya. Jika perlu pendapatannya dibuat tinggi sehingga tidak hanya mampu hidup secara layak, tetapi juga cukup untuk hidup “terhormat”. Stick (tongkat) berkenaan dengan hukuman : ketika semua kebutuhannya dapat terpenuhi dan orang masih melakukan korupsi, maka harus diberikan hukuman yang keras karena tidak ada alasan lagi untuk melaksanakan tindakan korupsi.”

Pernyataan yang dikemukakan oleh Kwik Kian Gie tersebut, sebagai gambaran tentang pentingnya birokrasi secara kelembagaan menetapkan norma yang wajib ditaati bagi setiap

aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dengan adanya penghargaan dan hukuman dalam menilai kinerja birokrasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah. Upaya tersebut pada saat ini telah mulai dilakukan oleh pemerintah dengan adanya ukuran-ukuran atau standar kinerja dalam sistem “reward” yang populer dengan istilah “tukin” (tunjangan kinerja). Sebaliknya apabila aparatur birokrasi tidak memenuhi standar kerja yang ditetapkan, maka akan mendapatkan sanksi berupa penundaan bahkan peniadaan tunjangan kinerja.

Selain itu, harus ada perubahan cara pandang institusi birokrasi dalam memaknai sebagai pelayan publik yang cepat dan akurat, dengan memperpendek dan memudahkan pelayanan publik melalui perubahan pelayanan yang bersifat sentralistik menjadi desentralisasi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebutuhan kecepatan dan akurasi pelaksanaan fungsi dan tugas birokrasi sebagai kenyataan yang harus dihadapi. Hal ini tidak terlepas dari semakin tingginya mobilitas masyarakat, sehingga kecepatan dan akurasi menjadi ukuran penting dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, birokrasi pemerintah harus mampu mengikuti dinamika yang ada di masyarakat. Peningkatan peforma birokrasi pemerintah, melalui cara memperpendek dan

menyederhanakan fungsi serta tugas terutama yang bersentuhan kepentingan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan dengan mengubah kewenangan yang selama ini tersentralisasi sehingga membutuhkan waktu yang lama, menjadi desentralisasi kewenangan. Sesuai dengan (**Ndraha** : 191 : 2000) teori klasik bernama **Hukum Lengan (Arm) dan Jari (finger)**. Ada rumus yang dideduksikan dari hukum tersebut, yakni Short Arm Long Finger (SALF) dan Long Arm Short Finger (LASF). Teori tersebut, menggambarkan bahwa SALF menunjukkan model sentralisasi yang mengakibatkan panjang dan lamanya proses sehingga beban birokrasi terutama yang berada di garda depan terbebani dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sedangkan model SALF, menunjukkan bahwa ada proses yang pendek dan membutuhkan waktu yang singkat, sehingga birokrasi dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara efisien dan efektif.

Teori tersebut, ingin menunjukkan bahwa pentingnya desentralisasi kewenangan sehingga birokrasi lebih mudah dan leluasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Alasan objektif pentingnya desentralisasi kewenangan, sebagaimana dikemukakan oleh **Osborne dan Gaebler** (283-284 : 1999) bahwa lembaga yang terdesentralisasi mempunyai sejumlah keunggulan :
 “Pertama, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel

daripada yang tersentralisasi, lembaga tersebut dapat memberikan respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang berubah..... Kedua, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif daripada yang tersentralisasi.....Ketiga, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif dari pada yang tersentralisasi.....Keempat, lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen dan lebih besar produktivitas.”

Argumentasi yang dikemukakan di atas, pada hakekatnya ingin menunjukkan bahwa ada keterhubungan antara transformasi birokrasi secara kelembagaan dengan kecepatan dan akurasi penjalanan tugas dan fungsinya. Melalui desentralisasi kewenangan birokrasi menjadi lebih fleksibel, tidak terbelenggu dengan aturan formal dan struktur hirarkies yang panjang, sehingga dapat memfungsikan diri sebagai pelayanan publik sebagaimana harapan masyarakat.

Kesimpulan

Secara faktual, birokrasi pemerintah harus mampu mengembangkan diri untuk menyesuaikan dengan semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap penjalanan fungsi dan tugas birokrasi, khususnya sebagai pelayan publik. Melalui pemaparan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Bahwa birokrasi pemerintah sebagai organ pemerintah memiliki fungsi yang utama dan penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas, khususnya kecepatan dan akurasi pelayanan maka birokrasi baik secara individual maupun institusional harus berupaya mentransformasi diri.
2. Untuk merealisasikan kondisi tersebut maka perlu upaya perubahan dari dalam tubuh birokrasi sendiri baik perubahan dari aspek sisi individual, yakni aparat birokrasi, dengan merubah sikap dan cara pandang dalam menjalankan tugas, khususnya dalam hal melihat pekerjaan secara profesional, yakni sebagai tanggung jawab dan kewajiban. Selain itu jabatan didalamnya ada pertanggung jawaban terhadap publik.
3. Secara insitusal, transformasi birokrasi dengan melaksanakan secara tegas dengan menjalankan sistem penghargaan dan hukuman dan merubah dari sentralisasi kewenangan menjadi desentralisasi kewenangan.

Daftar Pustaka

Ndraha, Taliduhu, 2000, Ilmu Pemerintahan, IIP, Jakarta

....., 2000, Ilmu Pemerintahan II, IIP, Jakarta,

Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1999 , Mewirusahaakan Birokrasi, (Terjemahan Muhammad Rosyid), Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta

Priyono, Hendro, 1995, Dimensi Disiplin Dalam Birokrasi Pemerintahan. Jakarta

Rachbini, Didi J, 2002, Ekonomi Politik Paradigma Dan Teori Pilihan Publik, Ghalia Indonesia, Jakarta

Rasyid, Muhammad Ryaas, 1997,, Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi

Etika dan Kepemimpinan, 1997. Yassrif Watampone. Jakarta.

....., 1997, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru, Yassrif

Watampone, Jakarta

Siagian, Sondang P, 1994, Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi Dan Terapinya, Ghalia Indonesia, Jakarta

Supriatna, Tjahya, 1997, Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan, Humaniora Utama Press, Bandung.

Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta

Tanthowi, Pramono U. Dkk. (Ed), Membasmi Kanker Korupsi, PSAP, Jakarta.

Thoha, Miftah, 1995, Birokrasi
Indonesia Dalam Era
Globalisasi, Batang Gadis, Jakarta

Time, 1978, *Webster's New Ideal*
Dictionary, G & Merriam Co,
Philippines.

KETENTUAN PENULISAN

1. Artikel yang ditulis dapat berupa hasil penelitian atau ide gagasan dibidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi bisnis.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris maksimal 20 halaman quarto, spasi 1,5, huruf new roman dilengkapi abstrak dan kata kunci.
3. Nama penulis ditulis di bawah judul.
4. Artikel hasil penelitian sbb:
 - a. Judul
 - b. Nama penulis
 - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia / Inggris
 - d. Kata Kunci
 - e. Pendahuluan
 - f. Metode Penelitian
 - g. Pembahasan
 - h. Kesimpulan saran
 - i. Daftar Pustaka
5. Artikel (ide / gagasan)
 - a. Judul
 - b. Nama penulis
 - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia / Inggris
 - d. Kata Kunci
 - e. Pendahuluan
 - f. Sub Judul
 - g. Penutup
 - h. Daftar Rujukan
 - i. Lampiran
5. Artikel dikirim ke redaksi paling lambat dua bulan sebelum penerbitan

JIA	Vol : 9	No : 2	Hlm 1- 72	Bandar Lampung, April 2017	ISSN : 2-087- 0957
------------	----------------	---------------	----------------------	---------------------------------------	-------------------------------

